



PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamiin, atas bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tengah Tahun 2017. LAKIP Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan tugas yang meliputi tingkat keberhasilan dan hambatan-hambatan yang timbul untuk segera mencari pemecahannya.

Tahun 2017 merupakan tahapan tahun kedua dalam menapaki RPJM 2016 – 2019 yang merupakan rencana kerja jangka menengah Kabinet Kerja. Tahun 2017 sebagai tahun pembuktian kinerja Direktorat Bindiktara dalam memberikan berbagai layanan pendidikan bagi orang dewasa. Dengan adanya rotasi pimpinan dan penataan pegawai secara keseluruhan, serta adanya perubahan kebijakan yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Perubahan-perubahan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tentunya tidak semua dapat tergambarkan dalam LAKIP Tengah Tahun 2017 ini.

Dokumen LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2017 tergambar pula pencapaian visi, misi, tujuan, dan target pelaksanaan kegiatan Direktorat Bindiktara selama tahun 2017. Pada tahun 2017 Direktorat Bindiktara melaksanakan 1 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja kunci (IKK).

Dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2017 ini kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas kegiatan tahun-tahun ke depan.

Jakarta, 23 Januari 2018

Dr. Abdul Kahar
NIP 196402071985031005

DAFTAR ISI

Hal

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	5
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
D. Permasalahan Utama	13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja	16
---------------------	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	43

BAB IV PENUTUP

Penutup	49
---------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran:

- Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Bindiktara Tahun 2017 (Awal dan Revisi)
- Dokumen Pengukuran Kinerja Direktorat Bindiktara Tahun 2017

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara Berdasarkan Jenis Belanja	22
Tabel 2	Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara Berdsarkan Bagian	22
Tabel 3	Daya Serap Per Jenis Anggaran	43
Tabel 4	Daya Serap Berdasarkan Subbag dan Subdit	44
Tabel 5	Daya Serap Berdasarkan Pagu dan Perjanjian Kinerja	44
Tabel 6	Daya Serap Anggaran yang tidak dikontrak kinerjakan	48

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama GAMBAR	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Bindiktara	13



IKHTISAR EKSEKUTIF

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memerintahkan setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara konsisten dan konsekuen setiap tahunnya. Dengan melakukan penyusunan LAKIP ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance*, dikatakan salah satu artinya dengan LAKIP saja tidak menjamin terciptanya *good governance*, paling tidak bagi instansi penyusun dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan/penyelenggaraan dan meningkatkan kinerjanya, dapat mendorong peningkatan kinerja baik di bidang administratif dan teknis. Di bidang administrasi, dengan tertib administrasi dapat mengetahui kekurangan dan/atau kendala dalam melaksanakan program/kegiatan sebagai substansinya.

LAKIP Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) disusun dengan maksud untuk mengetahui gambaran secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2019.

Target IKK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 tersebut di atas ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Bindiktara yang didalamnya meliputi satu sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi,

kabupaten dan kota dengan **15 IKK** yang harus dicapai selama kurun waktu satu tahun 2017.

Untuk mendukung tercapaianya sasaran strategis tersebut, dialokasikan anggaran 455.604.864.000,- (empat ratus lima puluh lima milyar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2017 daya serap keuangan sebesar Rp. 453.201.540.951,- (empat ratus lima puluh tiga milyar dua ratus satu juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,47%.

Sedangkan Sasaran strategis dengan 15 IKK, bila disandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, realisasinya sebagai berikut:

- a. Untuk realisasi fisik, 15 IKK terealisasi sesuai target (100%)
- b. Untuk realisasi anggaran:
 - enam sasaran strategis sesuai target (100%)
 - sembilan capaian IKK dibawah target (kurang dari 100%)

Dalam pencapaian kinerja Direktorat Bindiktara ini mengalami beberapa kendala atau hambatan dan permasalahan, yaitu:

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*)
- b. Pemahaman lembaga dan dinas pendidikan akan juknis dari program yang dilaksanakan masih kurang
- c. Keterlambatan pengiriman laporan pelaksanaan kegiatan dari lembaga penyelenggara ke Direktorat Bindiktara
- d. Masih banyak lembaga PNF yang belum terakreditasi dan memiliki NPSN sebagai salah satu kriteria penerima bantuan
- e. Proposal dari lembaga PNF tidak memberikan jenis kegiatan yang sesuai dengan dana dan jenis kecakapan vokasi yang sesuai kriteria (juknis)..

Adapun langkah antisipatif yang diambil untuk mengatasi kendala atau hambatan dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran daerah untuk program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan
- b. Melakukan sosialisasi tentang ragam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat sehingga lembaga dan pemerintah daerah memahami pelaksanaan program sesuai dengan juknis yang ditetapkan
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui pertemuan-pertemuan, laman direktorat dan komunikasi langsung dengan menggunakan alat komunikasi agar pengiriman laporan dapat dilaksanakan sesuai dengan juknis yang ditetapkan
- d. Melakukan pendampingan dan mendorong lembaga untuk segera mendapatkan NPSN dan melakukan akreditasi.



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan merupakan bagian dari program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam masyarakat karena sifatnya yang luwes dalam penyelenggaraannya. Pendidikan nonformal dapat berperan sebagai layanan pendidikan alternatif dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Kesetaraan adalah masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami *drop out* pada pendidikan formal, masyarakat yang tidak terlayani di pendidikan formal seperti: suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat pulau luar, serta kaum perempuan yang termarginalkan. Oleh karena itu Direktorat Bindiktara mengangkat isu strategis: **"Membangun Budaya Literasi di Era Digital"**.

Ada nilai lebih dari pendidikan nonformal, yaitu setiap pembelajaran pada setiap tingkatan diberikan vokasi yang sesuai dengan keinginan peserta didik. Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi orang dewasa berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal yang sesuatu hal tidak terlayani pada jalur pendidikan formal.

Perubahan, pengembangan dan perluasan strategi pembelajaran memberikan suatu apresiasi dan nuansa baru terhadap cara-cara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama orang dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan formal maupun mereka yang *drop out* dari pendidikan formal.

Proses pembangunan menuntut partisipasi jutaan orang dewasa yang terdidik, sementara lembaga pendidikan formal (persekolahan) yang ada tidak mampu mengakses permasalahan-permasalahan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Di daerah-daerah tertentu sejumlah penduduk menemukan bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak mampu membekali keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara terbuka dan gamblang dalam masyarakat teknologis.

Proses pendidikan itu mengembang ke luar dari sistem-sistem formal terstruktur, ke dalam suatu sistem konfigurasi baru dari suatu rangkaian pemikiran dan pengalaman yang terpisah secara melebar, dan jenis pertemuan lainnya dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. Peran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan keterampilan vokasi yang diberikan ternyata mampu mewujudkan penyediaan layanan pendidikan yang strategis dan fungsional bagi masyarakat.

Ada beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di antaranya adalah: Masyarakat ikut membangun pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar-sanggar kegiatan belajar lain, magang, Kejar Usaha Produktif, Pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren memberikan bekal kepada santri tidak hanya dalam bentuk pendidikan agama akan tetapi sudah mulai bergeser pada pendidikan umum, dan keterampilan wirausaha sebagai bekal hidup dan kehidupannya di masyarakat.

Terciptanya masyarakat gemar belajar (*learning society*) memberikan nuansa baru dan ruh pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini dicermati sebagai suatu wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat. Iklim tersebut mendorong terbukanya kesempatan setiap orang, organisasi dan institusi sosial, industri dan masyarakat untuk belajar lebih luas; tumbuhnya semangat dan motivasi untuk belajar mandiri (*independent learning*) untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hayat, dan memperkuat keberdaya-didikan (*educability*) masyarakat agar selalu mendidik diri dan masyarakat di lingkungannya, adalah merupakan sisi positif dari lahirnya konsep-konsep yang mendasari pendidikan nonformal dalam membangun kemandirian bangsa.

Ciri masyarakat mandiri dapat dipahami dari tumbuhnya masyarakat gemar belajar, dan masyarakat yang mampu menciptakan berbagai peluang (pendidikan nonformal) di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai potensi, keterampilan dan kecakapannya.

Grand desain penyelenggaraan pendidikan keaksaraan di Indonesia sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membebaskan masyarakat dari permasalahan buta aksara, membagi pendidikan keaksaraan menjadi 2 (dua) jenis layanan yaitu pendidikan keaksaraan dasar dan pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan dasar bertujuan untuk menumbuhkan kompetensi membaca, menulis, dan berhitung pada warga masyarakat yang masih buta aksara. Sementara itu, pendidikan keaksaraan lanjutan merupakan layanan bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar supaya kompetensi keberaksaraannya semakin berkembang dan lestari. Kedua layanan tersebut merupakan sistem pendidikan yang sinergis dan berkesinambungan sebagai upaya negara dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Sebagai upaya peningkatan keberaksaraan lanjutan, maka program terobosan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 adalah Pendidikan Multikeaksaraan sebagai pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keragaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, tujuan dari pendidikan multikeaksaraan tidak sekadar mendidik masyarakat mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu mengatasi persoalan yang terjadi dalam kehidupannya.

Pendidikan multikeaksaraan bisa menjadi medium untuk membuka kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pendidikan yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan keragaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan, seperti: agama, sosial dan budaya, ekonomi, dan kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan multikeaksaraan dalam implementasinya perlu mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat serta lingkungannya.

Selain program pendidikan Multikeaksaraan yang merupakan program keberaksaraan lanjutan yang menjadi program terobosan, maka program Direktorat Bindiktara juga tetap melanjutkan program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) dan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) yang merupakan program unggulan di tahun 2017. Program GIM ditujukan kepada masyarakat luas untuk menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca. Program GP3M ditujukan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga berusia 15-45 tahun yang termarginalkan, miskin, dan berpendidikan rendah khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. dan GIM dan GP3M merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat utamanya melalui pemberdayaan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.

Manfaat GIM dan GP3M diharapkan nantinya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khususnya perempuan marjinal dari berbagai aspek. Untuk itu GIM dan GP3M didukung dengan program pendidikan kecakapan hidup perempuan, pembinaan untuk daerah yang angka putus sekolah tinggi, dan daerah-daerah rawan trafficking serta buruh migran dan memberikan program pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

Melalui GIM dan GP3M diharapkan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pendidikan bagi kaum miskin melalui program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

Untuk mendukung keberhasilan dan GIM maupun GP3M diselenggarakan pula Program Kampung Literasi dan Program Desa Vokasi. Program Kampung Literasi untuk mendukung keberhasilan GIM, sedangkan Program Desa Vokasi untuk mendukung keberhasilan GP3M.

Kampung literasi merupakan model pembelajaran keaksaraan yang komprehensif, bukan sekadar belajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga melakukan aktivitas lainnya seperti belajar keterampilan bermatapencaharian hingga belajar kesenian untuk meningkatkan kualitas

hidup. Embrio kampung literasi bisa berupa taman baca masyarakat (TBM) yang di sana terdapat aktivitas seperti kegiatan baca tulis, aktivitas budaya dan ketrampilan. Kampung literasi, bagian dari Gerakan Indonesia Membaca yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan minat baca dan menambah pengetahuan masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia yang buta aksara cukup besar yakni 3.416.693 jiwa atau 2,07 persen dari jumlah penduduk. Angka ini harus terus diupayakan turun. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang didukung GIM dengan TBM dan kampung literasi merupakan upaya yang diharapkan akan berhasil menurunkan angka buta aksara yang lebih rendah/kecil.

Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra keterampilan bermatapencaharian, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Ke.setaraan (Bindiktara) disusun berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 1/U/2002, tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
5. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019.
6. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015-2019.
7. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 305-324 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

- Direktorat Bindiktara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bindiktara yang dipimpin oleh seorang Direktur melaksanakan fungsi:
 - 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 3) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 4) fasilitas sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;

- 5) fasilitas pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 6) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
- 9) pelaksanaan administrasi Direktorat;

Direktur Bindiktara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh empat pejabat eselon III dan sembilan pejabat eselon IV. Empat pejabat eselon III, yaitu: 1) Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, 2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca, 3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan, dan 4) Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan.

Sedangkan 9 pejabat eselon IV, terdiri dari 8 Kepala Seksi dan 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu: 1) Kepala Seksi Program, 2). Kepala Seksi Evaluasi, 3). Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan, 4). Kepala Seksi Budaya Baca, 5) Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan, 6). Kepala Seksi Pendidikan Berkelanjutan, 7). Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik, 8). Kepala Seksi Kemitraan, dan 9). Kepala Subbagian Tata Usaha.

b. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Program dan Evaluasi:

- Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan Direktorat;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;

- 2) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 3) Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- 4) Penyusunan bahan dan fasilitas pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat; dan
- 6) Penyusunan laporan Direktorat.

c. Tugas Seksi Program:

Seksi Program, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

d. Tugas Seksi Evaluasi:

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta penyusunan laporan Direktorat.

e. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca:

- Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta budaya baca;

- 1) Penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca;
- 2) Penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta sarana dan prasarana budaya baca;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca; dan
- 5) Pelaksanan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca.

f. Tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan

Seksi Pendidikan Keaksaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan.

g. Tugas Seksi Budaya Baca

Seksi Budaya Baca mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana dan prasarana budaya baca.

h. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan:

- Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum,

sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
 - 2) penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
 - 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
 - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
 - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan; dan
 - 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

i. Tugas Seksi Pendidikan Kesetaraan:

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan.

j. Tugas Seksi Pendidikan Berkelanjutan:

Seksi Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di

bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan Berkelanjutan.

k. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan:

- Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 2) penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; dan
 - 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

l. Tugas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik:

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik,

evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

m. Tugas Seksi Kemitraan:

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan pendidikan kesetaraan dan kesetaraan.

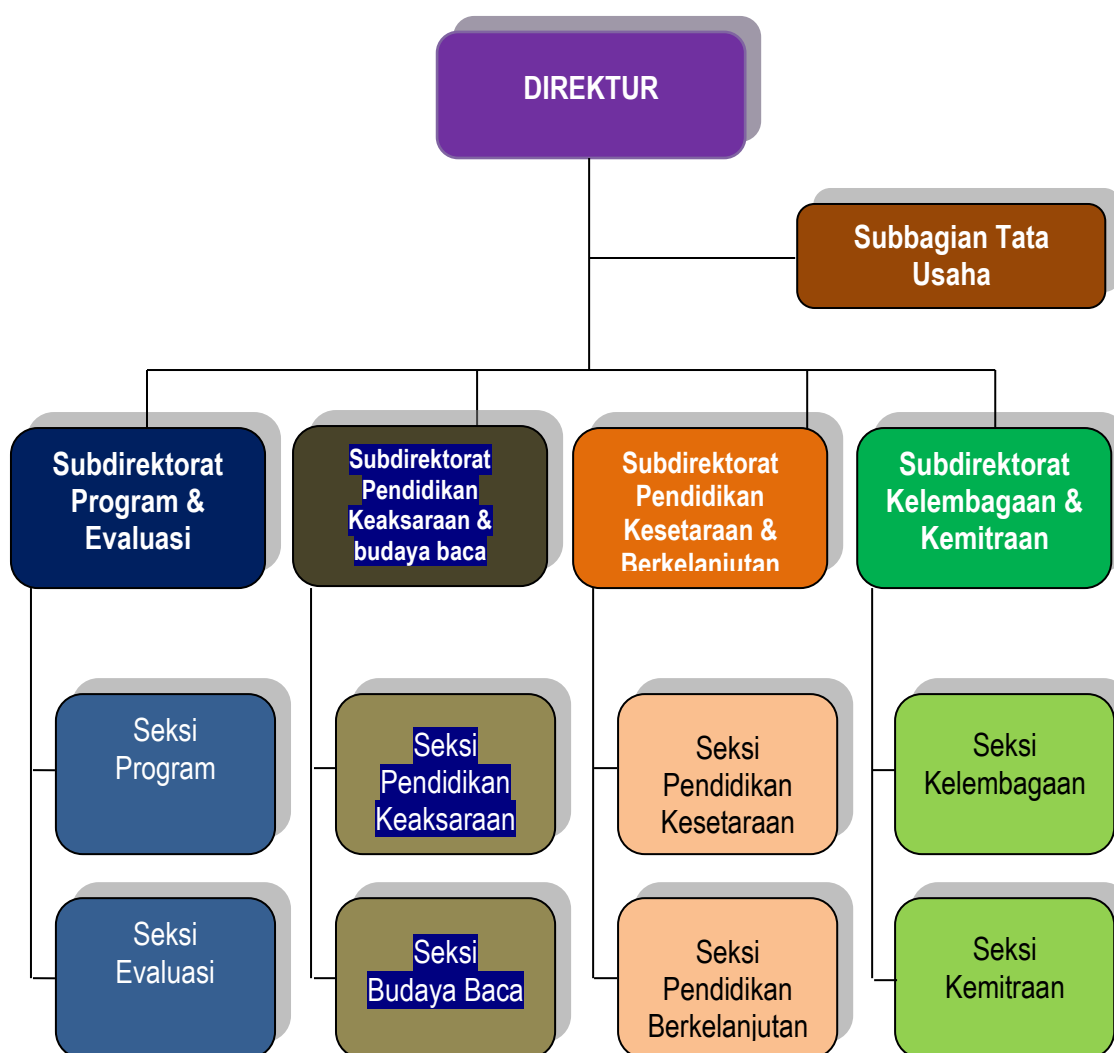
n. Tugas Subbagian Tata Usaha:

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan direktorat.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka, struktur atau bagan organisasi Direktorat Bindiktara dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Direktorat Bindiktara



D. Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas maka timbul berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan/kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, yang

akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*);

2. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Keaksaraan Dasar mengalami beberapa permasalahan/kendala seperti: a) Lokasi yang terpencil dan Warga Belajar yang masih mengutamakan pekerjaan dari pada belajar, b) Masih ada kab/Kota yang sulit mendapatkan NIK peserta didik, c) Sebagian laporan Keaksaraan Dasar mengalami keterlambatan pengiriman.
3. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Keaksaraan Lanjutan/Usaha Mandiri mengalami beberapa permasalahan/kendala seperti: a) Anggaran yang terbatas (hanya 50%) dari lulusan KD yang bisa dibiayai, b) Pengusulan nomor seri SUKMA belum sepenuhnya dipahami, c) Sebagian laporan Keaksaraan Lanjutan mengalami keterlambatan.
4. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A dan Paket B mengalami beberapa permasalahan/kendala seperti: a) keterlambatan pengajuan usulan lembaga penerima BOP dari dinas pendidikan Kab/Kota, dan b) Sebagian laporan pelaksanaan BOP tahun sebelumnya dari lembaga PNF belum dibuat/dikirim.
5. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C dan Vokasional mengalami permasalahan/kendala seperti: a) Proposal dari lembaga PNF tidak memberikan jenis kegiatan yang sesuai dengan dana dan jenis kecakapan vokasi yang sesuai kriteria (juknis), b) Sebagian laporan pelaksanaan BOP tahun sebelumnya dari lembaga PNF belum dibuat/dikirim.
6. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Desa Vokasi dan Kampung Literasi melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dan BOP Kampung Literasi mengalami beberapa permasalahan/kendala yang sama seperti: a) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi, dan b) Kurangnya lembaga yang siap dan belum memiliki legalitas serta tidak adanya pegiat di daerah tersebut.

7. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF mengalami beberapa permasalahan/kendala seperti: a) Belum semua PKBM memiliki Akreditasi PKBM, dan b) Masih ada PKBM yang belum menyampaikan laporan, salah satu kendalanya adalah PKBM sedang memproses pembayaran pajak.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, diperlukan sebuah komitmen bersama seluruh pihak yang berada di dalam Unit Kerja yang sama dan instansi terkait. Direktur Bindiktara selaku pejabat penanggungjawab program dan kegiatan, telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas pada awal tahun 2017 untuk mencapai sasaran strategis, dan target kinerja Direktorat Bindiktara.

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019, Direktorat Bindiktara menetapkan 1 sasaran strategis *“Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota”* yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yang perealisasiannya didukung oleh 15 indikator kinerja (IKK), beserta target kinerja dan anggaran, sebagai berikut:

1. *“Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar”*

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 53.700 orang dengan anggaran Rp. 34.346.930.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 53.700 orang, sedangkan anggaran berkurang menjadi Rp. 31.983.178.000,-.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar untuk daerah 3T;
- b. Pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar untuk Suku

Terasing/Komunitas Adat Terpencil;

- c. Pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar untuk Papua dan Papua Barat

2. *"Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan lanjutan"*

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 46.400 orang dengan anggaran Rp. 32.864.030.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 46.400 orang, sedangkan anggaran berkurang menjadi Rp. 31.942.919.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
- b. Pemberian BOP Pendidikan Multikeaksaraan

3. *"Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional"*

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 6.000 orang dengan anggaran Rp. 5.820.000.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 6.000 orang, dengan anggaran menjadi Rp. 5.880.000.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A

4. *"Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional"*

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 67.120 orang dengan anggaran Rp. 97.969.773.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 67.120 orang, dengan anggaran menjadi Rp. 93.968.000.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B

5. "Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional"

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 109.500 orang dengan anggaran Rp. 188.169.000.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja berkurang menjadi 106.500 orang, dengan anggaran menjadi Rp. 181.050.000.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C
- b. Pemberian Bantuan Pendidikan Vokasional

6. "Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi"

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 28 desa dengan anggaran Rp. 5.189.510.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja menjadi sebanyak 35 desa, dengan anggaran menjadi Rp. 5.065.470.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Desa Vokasi;
- b. Verifikasi dan penilaian penerima bantuan pemerintah;
- c. Bimbingan teknis pengelolaan bantuan pemerintah

7. "Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi"

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 60 desa dengan anggaran Rp. 6.241.670.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja menjadi sebanyak 42 desa, dengan anggaran menjadi Rp. 5.354.185.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Kampung Literasi;
- b. Verifikasi dan penilaian penerima bantuan pemerintah;
- c. Bimbingan teknis pengelolaan bantuan pemerintah;
- d. Kapasitas penggiat literasi
- e. Pendampingan pengelolaan bantuan pemerintah

8. "Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan"

kecakapan hidup perempuan”

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 5.730 orang dengan anggaran Rp. 5.730.000.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja menjadi sebanyak 5.430 orang, dengan anggaran menjadi Rp. 5.430.000.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh ouput/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

9. ”Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM”

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 161 lembaga dengan anggaran Rp. 8.050.000.000,-. Dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 161 lembaga dengan anggaran yang sama sebesar Rp. 8.050.000.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh ouput/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Sarana PKBM

10. ”Jumlah TBM yang dirintis dan memperoleh penguatan”

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 36 lembaga dengan anggaran Rp. 1.080.000.000,-. Dalam revisi terakhir, target kinerja menjadi bertambah sebanyak 40 lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh ouput/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan sarana TBM

11. ”Satuan pendidikan SKB memperoleh revitalisasi kelembagaan”

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 25 lembaga dengan anggaran Rp. 30.223.140.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja menjadi bertambah sebanyak 26 lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 26.571.311.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh ouput/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Prasarana SKB;
- b. Verifikasi dan penilaian penerima dana bantuan

- c. Pendampingan pengelolaan dana bantuan pemerintah;
- d. Bimbingan teknis pengelolaan bantuan pemerintah

12. "Jumlah satuan pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran"

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 79 lembaga dengan anggaran Rp. 7.900.000.000,-. Dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 79 lembaga dengan anggaran yang sama sebesar Rp. 7.900.000.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh ouput/kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Sarana SKB

13. "Jumlah NSPK/Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan"

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 49 dokumen dengan anggaran Rp. 2.123.950.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 49 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.999.457.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh ouput/kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

14. "Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana"

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 dokumen dengan anggaran Rp. 2.643.020.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target kinerja tetap sebanyak 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 2.349.046.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh ouput/kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;
- b. Penyusunan Laporan dan Evaluasi

15. "Jumlah dokumen Penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi"

Pada awal tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran Rp. 867.068.000,-. Namun, dalam revisi terakhir, target

kinerja tetap sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 652.557.000,- .

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional.

Sasaran Strategis “Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota” ini mengalami revisi dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Bindiktara dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas.

Adapun perubahan atau revisi dari Perjanjian Kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa anggaran yang dialokasi oleh Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, sesuai Kontrak Kinerja awal yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat tanggal 8 Februari 2017 sebesar RP. 429.218.091.000,- dari total anggaran yang tertera pada DIPA 01 sebesar Rp. 481.532.417.000,-, maka terdapat anggaran sebesar Rp. 52.314.326.000,- yang tidak dikontrakkinerjakan.
2. Besarnya anggaran yang dialokasi oleh Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, sesuai Kontrak Kinerja revisi yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat tanggal 14 Agustus 2017 sebesar RP. 409.396.123.000,- dari total anggaran yang tertera pada DIPA 04 sebesar Rp. 455.604.864.000,-, maka terdapat anggaran sebesar Rp. 46.208.741.000,- yang tidak dikontrakkinerjakan.
3. Apabila disandingkan dengan total anggaran yang tertera dalam DIPA 00 maka akan terlihat besarnya pemotongan anggaran sebesar Rp. 25.927.553.000,- atau setara dengan 5.4%.

Sedangkan target anggaran berdasarkan berdasarkan jenis belanja Direktorat Bindiktara tahun 2017, dapat dilihat seperti tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	TARGET	%
1	Belanja Pegawai	Rp 5,121,579,000	1.12
2	Belanja Barang	Rp 448,061,623,000	98.35
3	Belanja Modal	Rp 1.921,662,000	0.42
4	Bansos	Rp 500,000,000	0.11
TOTAL		Rp 455,604,864,000	100

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bindiktara tahun 2017 dialokasikan dana pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Direktorat Bindikastara Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas Nomor: SP DIPA-023.05.1.666866/2017 Revisi ke 04 tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 455.604.864.000,- (empat ratus lima puluh lima milyar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Bagian
Tahun 2017

NO	BAGIAN	TARGET	%
1.	Subbag Tata Usaha	Rp 16.046.834.000,-	4%
2.	Subdit Kemitraan dan Kelembagaan	Rp 51.374.319.000,-	11%
3.	Subdit Program dan Evaluasi	Rp 6.428.522.000,-	1%
4.	Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	Rp 308.206.035.000,-	68%
5.	Subdit Keaksaraan dan Bu-daya Baca	Rp 73.549.154.000,-	16%
Total		Rp 455.604.864.000,-	100.00%

BAB
3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2, bahwa pada tahun anggaran 2017 ini, Direktorat Bindiktara telah menetapkan satu sasaran strategis “Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota” yang harus diwujudkan melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan ke dalam 15 Indikator Kinerja (IKK). Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pencapaian target-target dari 15 IKK tersebut dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi dari setiap IKK dengan target yang ditetapkan, baik ketercapaian secara fisik maupun anggaran.

Tingkat realisasi ketercapaian sasaran strategis Direktorat Bindiktara didukung oleh 15 indikator kinerja secara fisik sebagai berikut::

1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar

Keaksaraan Dasar merupakan upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. Penduduk tuna aksara yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraan dasar tersebut mendapat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 53.700 orang, dan setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 53.700 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Lokasi yang terpencil dan Warga Belajar yang masih mengutamakan pekerjaan dari pada belajar;
- b. Masih ada kab/Kota yang sulit mendapatkan NIK peserta didik; dan
- c. Sebagian laporan Keaksaraan Dasar mengalami keterlambatan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, maka langkah-langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi sasaran berdasarkan lokasi (Terpadat, Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), Komunitas Adat Terpencil (KAT), Papua, dan Papua Barat);
- b. Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala kampung. Untuk daerah yang lain wajib memiliki NIK hingga waktu yang ditentukan belum terpenuhi dapat dialihkan ke daerah lain; dan
- c. Membuat surat edaran direktur untuk menyampaikan laporan.

Capaian angka melek aksara ini dilihat dari anggaran APBN Direktorat Bindiktara mengalami penurunan target dalam dua tahun terakhir, yaitu dari 150.525 orang di tahun 2015 dan 64.280 orang di tahun 2016 menjadi 53.700 orang di tahun 2017. Penurunan target sasaran ini dikarenakan menurunnya jumlah penduduk tuna aksara dan bergesernya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi mempertahankan keberaksaraan melalui program Keaksaraan Lanjutan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 97,47%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 3,11%, hal ini disebabkan oleh pemberian afirmasi bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Keaksaraan Dasar pada kabupaten yang merupakan kantong-kantong buta aksara yang

diikuti dengan bimbingan secara intensif, (seperti di daerah 3T, Komunitas Adat Terpencil, Papua dan Papua Barat). Selain itu juga dikarenakan keberhasilan atas efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah penggunaan dana yang baik oleh pengelola, khususnya dana APBN. Selain pendanaan efisiensi sumber daya yang lain adalah kemampuan pengelola program baik itu pengelola dari lembaga maupun dari tutor sebagai pelaksana dalam pembelajaran keaksaraan dasar.

Apabila dibandingkan dengan target penduduk melek aksara sesuai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) Tahun 2015-2019 sebesar 150.525 orang, maka capaian kinerjanya hanya sebesar 36%.

Berikut ini disajikan target jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar dalam tiga tahun terakhir 2015-2017 sebagai berikut:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	150.525	64.280	53.700

2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan lanjutan

Keaksaraan lanjutan (KUM) merupakan program penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. Prinsip dari pembelajaran KUM adalah meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan melatih berbagai keterampilan bermatapencarian.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 46.400 orang, dan setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 46.400 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Anggaran yang terbatas (hanya 50%) dari lulusan KD yang bisa dibiayai;
- b. Pengusulan nomor seri SUKMA belum sepenuhnya dipahami; dan
- c. Sebagian laporan KUM mengalami keterlambatan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, maka langkah-langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dinas pendidikan membuat skala prioritas dari lulusan KD yang ada;
- b. Dinas pendidikan mencari sumber pembiayaan selain APBN; dan
- c. Membuat surat edaran Direktur Bindiktara ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan lembaga untuk segera menyampaikan laporan sesuai dengan yang tertuang dalam juknis. Lokasi yang terpencil dan Warga Belajar yang masih mengutamakan pekerjaan dari pada belajar;

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 98,2%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 2,28%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan penyaluran dana BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan BOP Pendidikan Multikeaksaraan dengan sistem kuota untuk setiap provinsi dan dinas pendidikan provinsi membantu pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi, menerima dan menilai proposal, melakukan verifikasi lembaga, dan mengusulkan lembaga penerima bantuan KUM ke Direktorat Bindiktara.

Capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan target dalam dua tahun terakhir yaitu dari 95.200 orang tahun 2015 dan 57.940 orang di tahun 2016 menjadi 46.400 orang di tahun 2017. Penurunan target sasaran ini dikarenakan: 1) perubahan sistem pengelolaan dari kewenangan pengelolaan yang awalnya dari Provinsi dan Kab/Kota menjadi Kab/Kota saja, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kendala koordinasi antara Direktorat Bindiktara dengan Pemerintah Daerah, dan 2) Pemerintah daerah tidak menganggarkan KUM dalam APBD melainkan hanya mengandalkan APBN, sedangkan APBN mengalami rasionalisasi anggaran sehingga target berkurang. Sedangkan bila dibandingkan dengan target penduduk mendapatkan layanan KUM sesuai

Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 95.200 orang, maka capaian kerjanya hanya sebesar 49%.

Berikut ini disajikan target jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan lanjutan dalam tiga tahun terakhir 2015-2017 sebagai berikut:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan lanjutan	95.200	57.940	46.400

3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 6.000 orang, dan setelah diukur pencapaian target kerjanya terealisasi sebanyak 6.000 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Pemberian BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A).

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Keterlambatan pengajuan usulan lembaga penerima BOP dari dinas pendidikan Kab/Kota; dan
- b. Sebagian laporan pelaksanaan BOP tahun sebelumnya dari lembaga PNF belum dibuat/dikirim.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- a. Mengirim surat ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar melakukan sosialisasi tentang program Paket A;
- b. Memberi surat edaran, menghubungi secara langsung, menjemput ke dinas pendidikan kab/kota yang bersangkutan;
- c. Membuat surat edaran Direktur Bindiktara ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan lembaga untuk segera menyampaikan laporan sesuai dengan yang tertuang dalam juknis; dan

- d. Dilakukan evaluasi juknis BOP tahun 2018 tentang pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 86,36%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 13,64%. Peningkatan ini disebabkan karena pelaksanaan penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A dengan sistem kuota untuk setiap Kab/Kota dan dinas pendidikan Kab/Kota membantu pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi, menerima dan menilai proposal, melakukan verifikasi lembaga, dan mengusulkan lembaga penerima bantuan Paket A ke Direktorat Bindiktara.

Apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis Direktorat Bindiktara, capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan target dalam dua tahun terakhir yaitu dari 11.575 orang tahun 2015 dan dari 11.000 orang di tahun 2016 menjadi 6.000 orang atau 25% di tahun 2017. Sedangkan bila dibandingkan dengan target remaja dan orang dewasa yang mendapatkan layanan Paket A sesuai Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebesar 2.345 orang, maka capaian kinerjanya mencapai 255%.

Berikut ini disajikan target jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A	11.575	11.000	6.000

4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 67.120 orang, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 67.120 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%. Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Pemberian BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket B).

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Keterlambatan pengajuan usulan lembaga penerima BOP dari dinas pendidikan Kab/Kota; dan
- b. Sebagian laporan pelaksanaan BOP tahun sebelumnya dari lembaga PNF belum dibuat/dikirim.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- a. Mengirim surat ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar melakukan sosialisasi tentang program Paket B;
- b. Memberi surat edaran, menghubungi secara langsung, menjemput ke dinas pendidikan kab/kota yang bersangkutan;
- c. Membuat surat edaran Direktur Bindiktara ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan lembaga untuk segera menyampaikan laporan sesuai dengan yang tertuang dalam juknis; dan
- d. Dilakukan evaluasi juknis BOP tahun 2018 tentang pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 76,11%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 33,46%. Peningkatan ini disebabkan karena pelaksanaan penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B dengan sistem kuota untuk setiap Kab/Kota dan dinas pendidikan Kab/Kota membantu pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi, menerima dan menilai proposal, melakukan verifikasi lembaga, dan mengusulkan lembaga penerima bantuan Paket B ke Direktorat Bindiktara.

Capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan target dalam dua tahun terakhir yaitu dari 652.213 orang tahun 2015 dan dari 93.986 orang di tahun 2016 menjadi 67.120 orang atau 28,6% di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target remaja dan orang dewasa yang mendapatkan layanan Paket B sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 156.558 orang, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 42,87%.

Berikut ini disajikan target Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B	652.213	93.986	67.120

5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 106.500 orang, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 106.500 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan Menengah Umum dan Vokasional dengan didukung oleh 2 Sub Output, yaitu (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C yang telah membelajarkan 98.500 orang sesuai target yang ditentukan atau pencapaian kinerjanya 100% dan, (2) Peningkatan Keterampilan Pendidikan Vokasional membelajarkan 8.000 orang sesuai dengan yang ditargetkan atau pencapaian kinerjanya 100%.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- Keterlambatan pengajuan usulan lembaga penerima BOP dari dinas pendidikan Kab/Kota;
- Sebagian laporan pelaksanaan BOP tahun sebelumnya dari lembaga PNF belum dibuat/dikirim; dan
- Proposal dari lembaga PNF tidak memberikan jenis kegiatan yang sesuai dengan dana dan jenis kecakapan vokasi yang sesuai kriteria (juknis).

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- a. Mengirim surat ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar melakukan sosialisasi tentang program Paket C dan vokasional;
- b. Memberi surat edaran, menghubungi secara langsung, menjemput ke dinas pendidikan kab/kota yang bersangkutan;
- c. Membuat surat edaran Direktur Bindiktara ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan lembaga untuk segera menyampaikan laporan sesuai dengan yang tertuang dalam juknis;
- d. Menyeleksi dan memberikan bimbingan teknis untuk perbaikan proposal; dan
- e. Dilakukan evaluasi juknis BOP tahun 2018 tentang pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 66,23%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 46,01%. Peningkatan ini disebabkan karena: (1) pelaksanaan penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Vokasional dengan sistem kuota untuk setiap Kab/Kota dan dinas pendidikan Kab/Kota membantu pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi, menerima dan menilai proposal, melakukan verifikasi lembaga, dan mengusulkan lembaga penerima bantuan Paket B ke Direktorat Bindiktara; dan (2) Program Vokasi menjadi salah satu tuntutan masyarakat agar selain mendapatkan kemampuan akademik namun juga keterampilan untuk berusaha.

Capaian indikator kinerja ini mengalami fluktuatif (naik-turun) target dalam dua tahun terakhir yaitu dari 35.070 orang di tahun 2015 dan naik 144.080 orang di tahun 2016 dan mengalami penurunan lagi menjadi 106.500 orang atau 26,1% di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target remaja dan orang dewasa yang mendapatkan layanan Paket C dan vokasional sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 427.449 orang, maka capaian kerjanya hanya mencapai 24,9%.

Berikut ini disajikan target Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional	35.070	144.080	106.500

6. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 35 desa, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 35 desa, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Pemberian bantuan Desa Vokasi, verifikasi dan penilaian proposal serta bimbingan teknis yang dilakukan dalam pengelolaan bantuan pemeritnah. Dalam pencapaian target kinerja ini, tidak ditemui adanya hambatan dan permasalahan. Semua pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja dua tahun pelaksanaan adalah tetap atau 100%. Capaian kinerja ini disebabkan karena pelaksanaan penyaluran (BOP) desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dengan: 1) banyaknya proposal yang diterima oleh Direktorat Bindiktara sejak awal-awal tahun 2) sistem kuota yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Direktorat Bindiktara, 3) melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/ desa penerima bantuan.

Capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan target dari 20 desa di tahun 2016 menjadi 35 desa atau 75% di tahun 2017. Pada IKK ini di tahun baru dimulai tahun 2016, sehingga tahun 2015 belum ada. Apabila dibandingkan dengan target jumlah desa yang menyelenggarakan desa vokasi sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 68 desa, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 51,47%.

Berikut ini disajikan target Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dalam dua tahun terakhir 2016-2017:

IKK	2016	2017
Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	20	35

7. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 42 orang, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 42 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- Terdapat lembaga yang tidak siap dan belum memiliki legalitas untuk melaksanakan program kampung literasi;
- Tidak adanya pegiat literasi di daerah tersebut; dan
- Sebagian laporan Keaksaraan Lanjutan mengalami keterlambatan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- Pengalihan quota ke Kab/Kota yang lebih mampu dan lebih membutuhkan;
- Melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/desa penerima bantuan, agar memahami dan bisa melaksanakan program pemberdayaan desa vokasi sesuai juknis; dan
- Lembaga yang mempunyai pegiat dan dukungan kuat dari Pemda yang pernah melaksanakan GIM.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja dua tahun pelaksanaan adalah tetap atau 100%. Capaian kinerja ini disebabkan karena pelaksanaan penyaluran (BOP) desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi dengan: 1) banyaknya proposal yang diterima oleh Direktorat Bindiktara sejak awal-awal tahun 2) antusiasme penggiat literasi akan program ini, dan 3) melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/ desa penerima bantuan.

Capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan target dari 31 desa di tahun 2016 menjadi 42 desa atau 73,81% di tahun 2017. Pada IKK ini di tahun baru dimulai tahun 2016, sehingga tahun 2015 belum ada. Apabila dibandingkan dengan target jumlah desa yang menyelenggarakan kampung literasi sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 68 desa, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 61,76%.

Berikut ini disajikan target Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi dalam dua tahun terakhir 2016-2017:

IKK	2016	2017
Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	31	42

8. Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar kecakapan sosial, personal, akademik, dan keterampilan kepada perempuan dewasa yang berkeaksaraan rendah.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 5.430 orang, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 5.430 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Pemberian Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Proposal dari lembaga PNF tidak memberikan jenis kegiatan yang sesuai dengan dana dan jenis kecakapan hidup perempuan yang sesuai kriteria (juknis); dan
- b. Sebagian laporan pelaksanaan bantuan PKH-P tahun sebelumnya dari lembaga PNF belum dibuat/dikirim.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- a. Menyeleksi dan memberikan bimbingan teknis untuk perbaikan proposal;

- b. Membuat surat edaran direktur untuk menyampaikan laporan;
- c. Penagihan laporan secara langsung; dan
- d. Dilakukan evaluasi juknis PKH-P tahun 2018 tentang pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja dua tahun pelaksanaan adalah tetap atau 100%. Peningkatan ini disebabkan karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sistem kuota yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Direktorat Bindiktara.

Capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan target dalam dua tahun terakhir yaitu dari 10.000 orang di tahun 2015 dan 10.000 orang di tahun 2016 menjadi 5.430 orang atau 54,3% di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 15.500 orang, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 35,03%.

Berikut ini disajikan target Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	10.000	10.000	5.430

9. Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 161 lembaga, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 161 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana PKBM.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. PKBM yang belum terakreditasi sebagai salah satu kriteria pemberian bantuan sesuai dengan juknis; dan

- b. Sebagian laporan pelaksanaan bantuan sarana PKBM belum mengirimkan laporan karena terkendala proses pembayaran pajak.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- Diadakan pertemuan dengan organisasi mitra (ormit) untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam bentuk workshop agar segera melakukan akreditasi;
- Membuat surat edaran direktur untuk menyampaikan laporan;
- Penagihan laporan secara langsung; dan
- Dilakukan evaluasi juknis bantuan Sarana SPNF tahun 2018 tentang pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 85,11%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 30,43%. Peningkatan ini dikarenakan pelaksanaan penyaluran bantuan sarana satuan pendidikan nonformal sistem kuota yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Direktorat Bindiktara.

Capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan target dalam dua tahun terakhir yaitu dari 445 lembaga orang di tahun 2015 dan 280 lembaga di tahun 2016 menjadi 161 lembaga atau 42,5% di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 600 lembaga, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 26,83%.

Berikut ini disajikan target Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	445	280	161

10. Jumlah TBM yang dirintis dan memperoleh penguatan

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 40 lembaga, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 40 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Bantuan Sarana TBM.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi;
- b. Sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi quota yang diberikan oleh Direktorat; dan
- c. Walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahamai secara benar tentang pelaksanaan program Pengadaan sarana TBM.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- a. Mengadakan sosialisasi terhadap *stake holder* terhadap pemahaman program Bantuan Sarana TBM; dan
- b. Melaksanakan pendampingan terhadap lembaga penerima bantuan, agar memahami dan bisa melaksanakan program Sarana TBM sesuai juknis.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 80%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 50%. Peningkatan ini dikarenakan pelaksanaan pelaksanaan penyaluran bantuan sarana TBM yang diberikan kepada lembaga yang mengajukan proposal ke Direktorat Bindiktara yang berasal dari pendanaan APBN. Pemberdayaan TBM ini juga berkat bantuan dana APBD dan swadaya masyarakat khususnya pengelola TBM di masyarakat.

Capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan target dari 214 lembaga di tahun 2016 menjadi 40 lembaga atau 42,5% di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 235 lembaga, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 26,83%.

Berikut ini disajikan target Jumlah TBM yang Dirintis dan Memperoleh Penguatan dalam dua tahun terakhir 2016-2017:

IKK	2016	2017
Jumlah TBM yang Dirintis dan Memperoleh Penguatan	214	40

11. Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 26 lembaga, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 26 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Bantuan Prasarana SKB.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis dan penyusunan RAB mengakibatkan proposal yang masuk tidak sesuai juknis dan terjadi berulang kali revisi; dan
- b. Kurangnya koordinasi pihak SKB dengan Direktorat Bindiktara terhadap kendala pelaksanaan di lapangan menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- a. Dilakukan pendampingan secara intens terhadap SKB yang dianggap masih kurang memahami pelaksanaan program; dan
- b. Melakukan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui telepon, kunjungan langsung, internet, dan sebagainya.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerjanya tetap. Peningkatan ini dikarenakan pelaksanaan penyaluran bantuan prasarana SKB dengan sistem kuota yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Direktorat Bindiktara.

Capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan target dari 20 lembaga di tahun 2016 menjadi 26 lembaga atau 23,07% di tahun 2017.

Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 10 lembaga, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 260%.

Berikut ini disajikan target Satuan Pendidikan SKB memperoleh revitalisasi kelembagaan dalam dua tahun terakhir 2016-2017:

IKK	2016	2017
Satuan Pendidikan SKB memperoleh revitalisasi kelembagaan	20	26

12. Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 26 lembaga, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 26 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%. Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Bantuan Sarana SKB.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 ini masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- Sarana yang dibelanjakan tidak sesuai dengan RAB usulan (contoh: barang yang diusulkan untuk dibeli tidak sesuai dengan spec; dan
- Adanya pergantian pimpinan/rotasi di daerah yang juga berpengaruh terhadap perubahan kebijakan internal daerah.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai adalah:

- Revisi RAB (spec) menyesuaikan dengan pembelian; dan
- Koordinasi antara pimpinan sebelum dan sesudah rotasi agar keterlaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 88,02%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 25,35%. Peningkatan ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SPNF SKB dengan terus membangun komunikasi dan sinergisitas dengan pemerintah daerah melalui

dinas pendidikan dan juga keterlibatan aktif masyarakat sebagai warga belajar yang memanfaatkan fasilitas bantuan pembelajaran di SKB.

Capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan target dari 147 lembaga di tahun 2016 menjadi 79 lembaga atau 46,25% di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 80 lembaga, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 98,75%.

Berikut ini disajikan target Jumlah Satuan Pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran dalam dua tahun terakhir 2016-2017:

IKK	2016	2017
Jumlah Satuan Pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran	147	79

13. Jumlah Dokumen NSPK/Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan seiring dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, terhadap layanan pendidikan nonformal khususnya layanan pendidikan keaksaraan, maka pada tahun 2017 ini perlu disusun NSPK yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam melaksanakan/menyelenggarakan program

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 49 lembaga, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 49 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%. Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerjanya tetap. Pencapaian kinerja ini didukung oleh iklim organisasi yang baik, pemberdayaan para ahli dibidangnya baik akademisi dan praktisi sehingga mampu merealisasikan 49 naskah NSPK, sinergisitas antara pimpinan dan staf serta tim teknis yang terlibat dalam pembuatan dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Daya dukung SDM yang handal telah turut

mendukung pencapaian kinerja serta pemanfaatan dan maksimalisasi penggunaan dana yang efisien.

Capaian indikator kinerja ini mengalami fluktuatif dimana terdapat penurunan target dari 48 naskah tahun 2015 menjadi 19 dokumen di tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi 49 dokumen atau 157,89% di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 10 dokumen, maka capaian kinerjanya mencapai 390%.

Berikut ini disajikan target Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	48	19	49

14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 2 dokumen, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Layanan Internal (Overhead)” yang telah mampu merealisasikan 2 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan dengan 2 komponen (1) “Penyusunan Program dan Anggaran” merealisasikan 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan dan (2) “Penyusunan laporan Evaluasi”, merealisasikan 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerjanya tetap. Capaian IKK Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana didukung oleh iklim organisasi yang baik, sinergisitas antara pimpinan dan staf serta tim teknis yang terlibat dalam pembuatan dokumen ini. Daya dukung SDM yang handal telah turut mendukung pencapaian kinerja serta pemanfaatan dan maksimalisasi penggunaan dana yang efisien.

Capaian indikator kinerja ini tetap menghasilkan 2 dokumen setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat

Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 2 dokumen, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Berikut ini disajikan target Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	2	2	2

15. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apresiasi

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1 dokumen, dan setelah diukur pencapaian target kinerjanya terealisasi sebanyak 1 dokumen, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena didukung oleh output/kegiatan Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional melalui pelaksanaan kegiatan peringatan hari aksara internasional dengan melakukan berbagai lomba dan apresiasi oleh lembaga PNF dan tokoh.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaian kinerjanya sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah tetap. Capaian IKK Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apresiasi didukung oleh iklim organisasi yang baik, sinergisitas antara pimpinan dan staf serta tim teknis yang terlibat dalam penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi. Daya dukung SDM yang handal telah turut mendukung pencapaian kinerja serta pemanfaatan dan maksimalisasi penggunaan dana yang efisien.

Capaian indikator kinerja ini tetap menghasilkan 1 dokumen setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Direktorat Bindiktara tahun 2015-2019 sebesar 1 dokumen, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Berikut ini disajikan target Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apresiasi dalam tiga tahun terakhir 2015-2017:

IKK	2015	2016	2017
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apresiasi	1	1	1

Terwujudnya sasaran strategis dapat diketahui melalui ketercapaian target-target dari 15 IKK yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program-kegiatan. IKK yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja menunjuk pada target-target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan relevan pada kurun waktu satu tahun. Penetapan IKK ini telah melalui proses identifikasi sesuai dengan kewenangan dan fungsi unit kerja, dan kemampuan anggaran. Oleh karena itu, perjanjian kinerja dibuat tidak terlepas dari rencana kerja dan anggaran (RKAKL) Direktorat Bindiktara 2017.

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Sesuai Kontrak Kinerja

Anggaran penyediaan layanan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 yang di alokasikan pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan adalah sebesar Rp 455.604.864.000,- (empat ratus lima puluh lima milyar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut dikelompokkan kedalam 4 jenis belanja, yaitu (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, (3) Belanja Modal dan (4) Bansos. Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran dengan realisasinya dapat untuk mengukur kinerja Direktorat Bindiktara, seperti tampak pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara
Per Jenis Anggaran
Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 5.121.579.000,-	Rp 4.748.960.999,-	92,72
2.	Belanja Barang	Rp 448.061.623.000,-	Rp 446.040.980.752,-	99,55
3.	Belanja Modal	Rp 1.921.662.000,-	Rp 1.911.599.200,-	99,48
4.	Bansos	Rp 500.000.000,-	Rp 500.000.000,-	100
TOTAL		Rp 455.604.864.000,-	Rp 453.201.540.951,-	99,47

Sesuai struktur organisasi Direktorat Bindiktara bahwa Direktorat ini terdiri dari 5 bagian, yaitu (1) Subag Tata Usaha, (2) Subdit Kemitraan dan Kelembagaan, (3) Subdit Program dan Evaluasi, (4) Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan dan, (5) Subdit Keaksaraan dan

Budaya Baca, maka alokasi anggarannya juga dikelompokkan kedalam 5 bagian. Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran dengan realisasinya dapat untuk mengukur kinerja Direktorat Bindiktara, seperti tampak pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Subag Tata Usaha dan Subdit
Tahun 2017

NO	BAGIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Subbag Tata Usaha	Rp 16.046.834.000,-	Rp 15.165.004.442,-	94,50
2.	Subdit Kemitraan dan Kelembagaan	Rp 51.374.319.000,-	Rp 51.303.047.000,-	99,86
3.	Subdit Program dan Evaluasi	Rp 6.428.522.000,-	Rp 6.377.388.800,-	99,20
4.	Subdit Pendidikan Kesenjangan dan Pendidikan Berkelanjutan	Rp 308.206.035.000,-	Rp 306.970.275.556,-	99,60
5.	Subdit Keaksaraan dan Bu- daya Baca	Rp 73.549.154.000,-	Rp 73.385.825.153,-	99,78
Total		Rp 455.604.864.000,-	Rp 453.201.540.951,-	99,47

Dengan membandingkan antara target dengan realisasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran, perjanjian kinerja dan anggaran yang tidak dikinerjakan dapat untuk mengukur kinerja Direktorat Bindiktara, seperti tampak pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Anggaran Pagu dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2017

NO	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pagu	Rp 455.604.864.000,-	Rp 453.201.540.951,-	99,47
2	Perjanjian Kinerja	Rp 409.396.123.000,-	Rp 408.670.654.065,-	99,82

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, yaitu 1 Januari - 31 Desember 2017, secara umum penggunaan anggaran telah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebesar Rp 453.201.540.951,- (empat ratus lima

puluh tiga milyar dua ratus satu juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dari alokasi anggaran sesuai **pagu** sebesar Rp 455.604.864.000,- (empat ratus lima puluh lima milyar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) **dengan persentase capaian kinerja 99,47%.**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara Direktur Bindiktara dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, alokasi anggaran Direktorat Bindiktara yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis ***“Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota”***, yaitu sebanyak 15 IKK sebagai output kegiatan, capaian kinerjanya sebesar Rp 408.670.654.065,- (empat ratus delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp 409.396.123.000,- (empat ratus sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang ditargetkan **dengan persentase capaian kinerja 99,82%.**

Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 15 indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.938.416.695,- terealisasi sebesar Rp. 31.983.178.000,-, dengan persentase capaian sebesar 99,86%.
2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan lanjutan, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 31.942.919.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.813.422.870,-, dengan persentase capaian sebesar 99,59%.
3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.880.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.869.802.500,-, dengan persentase capaian sebesar 99,81%.

4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 93.968.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 93.968.000.000,-, dengan persentase capaian sebesar 100%.
5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 181.050.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 181.050.000.000,-, dengan persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini didukung oleh 2 sub output, yaitu (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C, yang telah merealisasikan anggaran Rp. 167.450.000.000,- dari target anggaran yang sama atau pencapaian kinerjanya 100%, dan (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Menengah Vokasional, yang telah merealisasikan anggaran Rp. 13.600.000.000,- dari anggaran yang ditargetkan atau pencapaian kinerjanya 100%.
6. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.065.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.906.447.000,-, dengan persentase capaian sebesar 96,86%.
7. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.354.185.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.336.936.600,-, dengan persentase capaian sebesar 99,68%.
8. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.430.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.430.000.000,-, dengan persentase capaian sebesar 100%.
9. Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.050.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.050.000.000,-, dengan persentase capaian sebesar 100%.
10. Jumlah TBM yang dirintis dan memperoleh penguatan, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.200.000.000,-, dengan persentase capaian sebesar 100%.
11. Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi

kelembagaan, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 26.571.311.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.563.348.000,-, dengan persentase capaian sebesar 99,97%.

12. Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.900.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.900.000.000,-, dengan persentase capaian sebesar 100%.
13. Jumlah dokumen NSPK/Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.999.457.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.786.279.000,-, dengan persentase capaian sebesar 89,34%.
14. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.349.046.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.311.180.000,-, dengan persentase capaian sebesar 98,39%.
15. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 652.557.000,- terealisasi sebesar Rp. 546.821.000,-, dengan persentase capaian sebesar 83,80%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua target anggaran dari 15 indikator kinerja Direktorat Bindiktara terealisasi sebesar 100%. Dari 15 indikator kinerja tersebut sebanyak 6 indikator kinerja terealisasi 100% dan 9 indikator kinerja di bawah 100%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya efisiensi perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi dalam pelaksanaan kegiatan yang mengundang mitra dari daerah, dikarenakan:
1) biaya/harga perjalanan maupun akomodasi dibayarkan berdasarkan ad cost dan pada kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu; dan/atau 2) tidak seluruh peserta yang diundang hadir mengikuti kegiatan, ada beberapa peserta yang tidak hadir dengan berbagai alasan.
- b. Adanya efisiensi pada harga barang di bawah pagu anggaran.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun anggaran sesuai dengan pagu yang tersedia;
- b. Melakukan konfirmasi kehadiran peserta untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Memastikan harga barang sesuai dengan pagu anggaran.

2. Anggaran Yang Tidak Dikontrak kinerjakan

Kalau dilihat alokasi anggaran penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tahun 2017 sebesar Rp 455.604.864.000,- sedangkan yang dikontrak kinerjakan antara Direktur Jenderal Paud dan Dikmas – Direktur Bindiktara sebesar Rp. 409.396.123.000,-. Artinya terdapat anggaran sebesar **Rp. 46.208.741.000,-** yang tidak dikontrak kinerjakan, dengan capaian kinerja sebesar **96,37%**, yaitu terealisasi anggaran sebesar Rp. 44.530.886.886,- dari Rp. 46.208.741.000,- yang telah ditargetkan, seperti tampak pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara
Yang tidak di Perjanjian Kinerja
Tahun 2017

NO	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Yang tidak di Perjanjian Kinerja	Rp 46.136.294.000,-	Rp 44.530.886.886,-	96,37



BAB 4

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja menunjukkan ketercapaian yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja tahunan. Akuntabilitas kinerja ini akan menggambarkan kinerja secara keseluruhan Direktorat Bindiktara Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas yang telah dapat direalisasikan oleh keempat subdirektorat yang ada. Untuk dapat mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Bindiktara dapat diukur dengan IKK yang telah ditetapkan. Namun perlu diketahui bahwa pencapaian kinerja ini: (1) sangat tergantung pada terlaksananya jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, (2) kebijakan pelaksanaan anggaran, dan (3) IKK yang ditetapkan untuk 1 tahun anggaran.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Direktorat Bindiktara adalah telah menunjukan hasil yang baik, sehingga dapat dikatakan capaian kinerja Direktorat Bindiktara sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Hanya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, diantaranya penghematan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pemahaman lembaga penyelenggara akan juknis program yang dilaksanakan, dan pengiriman laporan dari lembaga penyelenggara ke pusat yang mengalami keterlambatan. Agar kinerja Direktorat Bindiktara dapat lebih meningkat, maka di tahun 2018 diperlukan penyusunan anggaran yang lebih baik, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan Direktorat, reviu juknis secara berkala, melakukan pemantauan yang mendalam akan hambatan dan permasalahan yang dihadapi

di daerah dalam pelaksanaan program, dan evaluasi menyeluruh setiap selesai pelaksanaan program/kegiatan.

Demikian LAKIP Tahun 2017 Direktorat Bindiktara ini disusun, selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencapai target kinerja Direktorat Bindiktara tahun 2018. Diharapkan dari LAKIP Tahun 2017 ini dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja subdirektorat-subdirektorat di lingkungan Direktorat Bindiktara untuk mencapai target IKK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019.